



ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL

Anika Syahdila Putri¹⁾, Muchtolifah²⁾, Sishadiyati³⁾

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia¹

Email : anikasyahdila1911@gmail.com¹

ABSTRAK

Belanja Modal yang termasuk belanja daerah perlu diperhitungkan karena terkait dengan keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, belanja modal yang rendah dapat mempengaruhi kinerja berbagai instansi pemerintah. Belanja Modal menjadi syarat utama dalam memberikan standar minimal pelayanan publik pemerintah daerah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahunan yang bersifat *time series* yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 sampai 2019. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa secara simultan yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus secara bersama sama berpengaruh terhadap belanja modal di provinsi jawa timur tahun 2009-2019. Sedangkan secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, untuk dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal di provinsi jawa timur, begitu pula dengan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal di provinsi jawa timur.

Kata Kunci: PAD, DAU, DAK, Belanja Modal

ABSTRACT

Capital Expenditures which include regional expenditures need to be taken into account because they are related to the development of infrastructure and public facilities, capital expenditures that can affect the performance of various government agencies. Capital Expenditure is the main requirement in providing local government minimum public service standards. Therefore, this study aims to determine the effect on Regional Original Income, General Allocation Funds, Special Allocation Funds in East Java Province in 2009-2019. The data used in this study is time series annual secondary data obtained from the East Java Province Regional Budget Realization Report 2009 to 2019. The analytical method used in this study is multiple linear regression analysis. Based on the results of the research obtained, it shows that simultaneously regional original income, general allocation funds, special allocation funds, have an effect on capital expenditure in the province of East Java in 2009-2019. While partially local revenue has a positive effect on capital expenditure, general allocation funds have no effect on capital expenditure in East Java province, as well as special allocation funds have no effect on capital expenditure in East Java province.

Keywords: PAD, DAU, DAK, Capital Expenditure

PENDAHULUAN

Pemerintahan menerapkan kebijakan otonomi daerah pada kewenangan publik melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Undang-undang tersebut dengan adanya pengaturan kemandirian daerah memberikan kesepakatan bahwa setiap daerah perlu mengatasi semua kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dalam pelayanan, penyediaan fasilitas dan pembangunan infrastruktur yang merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah. Selain itu, dengan adanya pendekatan terhadap pelayanan pemerintah kepada masyarakat, maka masyarakat dapat menyaring dan mengontrol pemanfaatan aset yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Sari & Ningsih, 2018).

Dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat, penyusunan alokasi dan realisasi pada APBD adalah yang pertama dilakukan oleh pemerintah daerah. David Herman (2016) menjelaskan bahwa dalam APBD terdapat beberapa komponen yaitu : pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan yang berisikan dari DAU, DAK, dsb, serta pengeluaran yang berisi belanja-belanja. Dalam pembelanjaan daerah tidak lepas dari sumber penerimaan, baik berupa pinjaman daerah, pendapatan asli daerah ataupun dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yaitu terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, sedangkan Pendapatan Asli daerah sendiri yaitu dana yang bersumber dari daerah (Hermawan, 2017).

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Menurut Priambudi (2017) Alokasi Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. Belanja Modal yaitu salah satu kelompok dari belanja daerah yang digunakan dalam pembelian dan penyediaan barang berwujud memiliki daya guna satu tahun lebih yang dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik (Halim, 2014).

Dalam pembangunan daerah tidak akan lepas dari suatu keberhasilan dalam mengelola APBD secara efektif dan efisien dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nurzen (2016) menjelaskan bahwa jika semakin besar investasi modal maka diharapkan sanggup meningkatkan kualitas pada layanan publik. Oleh karena itu, dengan meningkatkan pengalokasian Belanja Modal atau melalui sumber-sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat mengubah proporsi belanja daerah. Pendapatan Asli daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Novalista, 2016).

Kemampuan keuangan pada setiap daerah tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatan, perihal tersebut menimbulkan terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah (Juniawan, 2018). Oleh karena itu dalam menanggulangi hal tersebut pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN dalam pelaksanaan

desentralisasi untuk mendanai kebutuhan daerah yaitu Dana Alokasi Umum. Berdasarkan (Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan) Dana Alokasi umum merupakan adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Maka pemerintah daerah dapat memakai dana perimbangan keuangan yaitu salah satunya Dana Aloksi Umum untuk dipergunakan dalam pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui Belanja Modal.

Dana yang bersumber dari APBN selain Dana Alokasi Umum adalah Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan kepada daerah yang dipergunakan untuk mendanai kegiatan khusus yaitu urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (*UU No.33 Tahun 2004*). Dana Alokasi Khusus dipergunakan untuk kegiatan kesehatan, pendidikan, insfrastruktur jembatan, infrastruktur jalan, insfrastruktur air minum, prasarana pemerintah daerah, sarana dan prasarana pedesaan, pertanian perdagangan, serta perikanan dan kelautan yang semua itu merupakan komponen dalam Belanja Modal yang penggunaannya di atur dan ditentukan oleh pemerintah pusat (Ukamaga, 2018). Maka dari itu dengan diadakannya pemanfaatan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam Belanja Modal (Juniawan, 2018).

Belanja Modal yang merupakan salah satu dari belanja daerah perlu diperhitungkan karena terkait dengan keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Juniawan (2018) menjelaskan untuk pemerimaan derah yang diantaranya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus diperuntukan pemda untuk sehingga dapat meningkatkan pelayanan ke masyarakat yaitu melalui fasilitas publik yang nantinya dapat meningkatkan Belanja Modal. Belanja modal yang rendah bisa mempengaruhi kinerja berbagai badan pemerintah. Belanja modal merupakan hal yang penting dalam meningkatkan perekonomian, sehingga dalam hal tersebut perlu intervensi layanan pemerintah mencakup rendahnya tingkat pencairan anggaran (Rifai, 2017). Hal tersebut terjadi Pada Provinsi Jawa Timur dalam catatan yang diberikan FKBN yaitu proporsi belanja modal di Jawa Timur sebesar 9,91% dimana hal tersebut masih jauh dibawah amanat permendagri tentang pedoman penyusunan APBD setiap tahunnya, minimal belanja modal proporsinya 25-30% dari total belanja daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa postur belanja di Jawa Timur masih kurang sehat dan berpotensi kurang produktif. Belanja Modal yang sejatinya untuk kepentingan publik perlu diperbesar sehingga dapat memiliki ruang fiskal yang cukup besar untuk program-program riil masyarakat (Sabdanews, 2019).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengamati masalah dan mengkaji lebih dalam lagi tentang Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2019. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2019.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini populasi yang akan diamati mencakup wilayah Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data tahunan yang terukur secara runtun waktu bersifat *time series* mulai 2009-2019. Data yang digunakan yaitu data sekunder, yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 sampai dengan 2019. Data diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik (BPS).

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan Analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 13.0 untuk mendapatkan gambaran keseluruhan mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain, dengan menggunakan uji koefisien determinasi (R Square), uji F simultan, dan uji t parsial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 1. Hasil Analisis Linier Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients |
|------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|
| | B | Std. Error | Beta |
| (Constant) | -24702850,260 | 408541466,572 | |
| Pendapatan Asli Daerah | ,091 | ,037 | ,432 |
| Dana Alokasi Umum | ,188 | ,206 | ,233 |
| Kemiskinan | ,097 | ,065 | ,363 |

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, diperoleh informasi bahwa hasil persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = -24.702.850,260 + 0,091\text{PAD} + 0,188\text{DAU} + 0,097\text{DAK}$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

β_0 : Nilai konstanta sebesar -24.702.850,260

Menunjukkan apabila Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) dan Dana Alokasi Khusus (X_3) dianggap konstan maka Belanja Modal (Y) akan turun sebesar 24.702.850,260 ribu rupiah.

β_1 : Koefisien regresi X_1 (β_1) : $Y = 0,091$

Menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh positif, dapat diartikan apabila Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar seribu rupiah maka Belanja Modal Provinsi Jawa Timur (Y) mengalami peningkatan sebesar 91 ribu rupiah. Dengan asumsi X_2 dan X_3 Konstan.

β_2 : Koefisien regresi X_2 (β_2) : $Y = 0,188$

Menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (X_2) berpengaruh positif, dapat diartikan apabila Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan sebesar seribu rupiah maka Belanja Modal Provinsi Jawa Timur (Y) mengalami peningkatan sebesar 188 ribu rupiah. Dengan asumsi X_1 dan X_3 Konstan.

β_3 : Koefisien regresi X_3 (β_3) : $Y = 0,097$

Menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (X_3) berpengaruh positif, dapat diartikan apabila Dana Alokasi Khusus mengalami peningkatan sebesar seribu rupiah maka Belanja Modal Provinsi Jawa Timur (Y) mengalami peningkatan sebesar 97 ribu rupiah. Dengan asumsi X_1 dan X_2 Konstan.

Koefisien Hasil Determinasi

Dalam menentukan koefisien determinasi yaitu dengan cara melihat nilai R-square, dimana nilai tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen terhadap model yang digunakan mampu menjelaskan variabel dependennya.

Tabel 2. Hasil Koefisien Determinasi

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,960 ^a | ,923 | ,889 | 307064320,6745 |

Sumber : Data diolah, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil dari uji Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,923 yang artinya variabel bebas terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, dapat menjelaskan variabel terikat yaitu Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur sebesar 92,3% dan sebanyak 7,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel model persamaan.

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Dalam pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal. Untuk menguji hipotesis digunakan uji sebagai berikut:

Uji F Signifikan (Simultan)

Pada uji F ini yaitu dengan cara membandingkan nilai signifikansi uji F dengan alpha 5% Ghazali, (2016). Jika nilai signifikansi uji F menunjukkan lebih kecil dari alpha 5%, maka hipotesis yang diajukan diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikansi uji F menunjukkan lebih besar dari alpha 5% maka hipotesis yang diajukan ditolak. Berikut hasil uji F

Tabel 3. Hasil Uji F (Simultan)

| ANOVA ^b | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------|----|-----------------|--------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 7859675759723750000.0 | 3 | 261989191990791 | 27.786 | .000 ^a |
| | | | 00 | 7000.000 | | |

| | | | |
|----------|-----------------------------|----|---------------------------|
| Residual | 7859675759723750000.0 00 | 7 | 942884970312621 00.000 |
| Total | 8519695238942580000.0 00 | 10 | |

Sumber: Data diolah, 2021

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui hasil pengujian statistik F dengan nilai F-Test = 27,786 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka nilai tersebut dapat dikatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur.

Uji Signifikan t (Parsial)

Pada uji t ini yaitu dengan cara membandingkan nilai signifikansi uji-t dengan alpha 5% (Ghozali, 2016). Jika signifikansi uji- t menunjukkan lebih kecil dari alpha 5%, maka hipotesis yang diajukan diterima. Sebaliknya, jika nilai *probability value* uji- t menunjukkan lebih besar dari alpha 5%, maka hipotesis yang diajukan ditolak. Berikut hasil uji t :

Tabel 4. Hasil Uji t (Parsial)

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
|------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| (Constant) | -24702850,260 | 408541466,745 | | -,060 | ,953 |
| Pendapatan Asli daerah | ,091 | ,037 | ,432 | 2,467 | ,043 |
| Dana Alokasi Umum | ,188 | ,206 | ,233 | ,914 | ,391 |
| Dana Alokasi Khusus | ,097 | ,065 | ,363 | 1,479 | ,183 |

sumber: data diolah, 2021

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel diatas, hasil penelitian di Jawa Timur tahun 2009-2019 diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,091 dan nilai t hitung sebesar 2,467 sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,043 lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, sehingga H1 diterima. Hasil yang diperoleh tersebut sesuai dengan hasil penelitian Nurzen (2016) yang menyatakan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2012-2014. Hal itu artinya jika pendapatan asli daerah terjadi peningkatan maka pendapatan daerah pada setiap tahunnya juga akan semakin meningkatkan alokasi belanja modal. Sehingga dana alokasi perimbangan yang biasa dialokasikan untuk dapat menutupi ketimpangan

anggaran pemerintah daerah akan semakin berkurang dan hal tersebut tentunya menjadi perkembangan positif yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah yang semakin baik kedepannya.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel diatas, hasil penelitian di Jawa Timur tahun 2009-2019 dapat di ketahui bahwa variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,188 dan nilai t hitung sebesar 0,914 sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,391 lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sehingga H2 ditolak. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis dan penelitian Juniawan (2018) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. Tidak berpengaruhnya Dana Alokasi Umum dikarenakan nilai dana alokasi umum yang kecil sehingga tidak berkontribusi secara keseluruhan terhadap pengalokasian belanja modal. Alokasi belanja modal tidak dapat meningkat jika daerah memiliki dana alokasi umum yang kecil, hal ini mengindikasikan bahwa dana alokasi umum yang digunakan untuk belanja modal dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat hanya sedikit dan lebih diperuntukkan dalam membiayai pengeluaran rutin, seperti belanja pegawai.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel di atas, hasil penelitian di Jawa Timur tahun 2009-2019 dapat di ketahui bahwa variabel Dana Alokasi Khusus memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,097 dan nilai t hitung sebesar 1,479 sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,183 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sehingga H3 ditolak. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis dan penelitian Juniawan (2018) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada kota dan kabupaten di provinsi Bali. Tidak berpengaruhnya Dana Alokasi Khusus tersebut dikarenakan dana alokasi khusus yang memiliki sifat *special grant*, dimana dana alokasi khusus yang hanya diperuntukkan untuk pembangunan yang lebih diprioritaskan dan sudah ditentukan dari pusat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2019 dapat disimpulkan bahwa secara simultan ketiga variabel indenpenen yaitu yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan untuk secara parsial dapat disimpulkan yaitu Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2019. Sedangkan, untuk variabel dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap belanja

modal di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2019.

Berdasarkan hasil analisis pengujian dan kesimpulan diatas maka saran yang diberikan bagi pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur diharapkan agar lebih mengoptimalkan peningkatan pelayanan daerah dan menggali potensi di daerah tersebut agar menambah pendapatan asli daerah sehingga dapat meningkatkan belanja modal. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah atau memperluas sampel penelitian serta menambah atau memperbaharui periode pengamatan dengan data yang lebih lengkap. Selain itu dapat menambah variabel atau mengganti dengan variabel lain yang dapat mempengaruhi belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- David Hermawan, A. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Se-Malang Raya). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2, 1-11.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Salemba Empat.
- Hermawan, R. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2015)*. Universitas Muhammadiyah surakarta.
- Juniawan, M. A. (2018). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(3).
- Novalista, R. L. (2016). PPengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten Atau Kota di Pr. *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Nurzen, M. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(April).
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan*. (2005).
- Priambudi, W. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013. *Jurnal Nomimal*, VI(3).
- Rifai, R. A. (2017). Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. *E-Jurnal Katalogis*.
- Sabdanews. (2019). *Struktur APBD TA 2020 Jadi Sorotan Tajam Fraksi-Fraksi DPRD Jatim*. Sabdanew.Com. <https://sabdanews.com/2019/11/22/apbd-ta-2020-sebesar-rp-35-triliun-disahkan-dprd-jatim/>
- Sari, P., & Ningsih, N. H. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Melalui PAD, DAK, dan DAU Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 12.
- Ukamaga, D. M. (2018). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah*

(Pad), Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Di Jawa Timur Tahun 2017). Universitas Jember.

Undang Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (2004).

Undang Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2004). UU RI.